

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam berbagai literatur ilmu administrasi, kebijakan disebut sebagai bagian dari dimensi strategis administrasi publik. Kebijakan merupakan proses pembuatan keputusan untuk menentukan tujuan dan cara atau alternatif terbaik dalam mencapai tujuan tersebut (T.Keban, Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu (2004:10) dimensi kebijakan berkenaan dengan keputusan tentang apa yang harus dikerjakan. Apabila dianalogikan, kebijakan adalah pekerjaan otak yang selalu memutuskan apa yang hendak dikerjakan agar jantung dan urat nadi (management) dan organ tubuh (organisasi) siap bergerak dan melaksanakan apa yang telah diputuskan. Kebijakan dapat dilihat sebagai suatu konsep filosofis, suatu produk, sebuah proses, maupun sebagai sebuah kerangka kerja.

Kenyataannya untuk memproses sebuah keputusan yang efektif dibutuhkan serangkaian prinsip, seperti prinsip rasionalitas, teknis maupun politis output dari proses tersebut dapat berupa keputusan tentang alternatif terbaik yang siap untuk diimplementasikan. Hal ini sejalan dengan pendapat Mustopadidjaja (2003;112) yang menyatakan bahwa kebijakan merupakan produk dan sebuah proses pengambilan keputusan yang tentu saja memerlukan bahan-bahan (input/masukan) yang umumnya merupakan produk dari suatu proses baik teknis ataupun sosial-politis. Kebijakan merupakan dimensi yang sangat penting, mengingat kedudukannya sebagai penentu tentang apa yang hendak dikerjakan. Sedangkan apa yang hendak dikerjakan harus

didasarkan atas masalah, kebutuhan, atau aspirasi tertentu. Jadi tidak benar kalau suatu kebijakan diputuskan tanpa ada masalah, kebutuhan atau aspirasi yang nyata dan tentu saja tidak bisa didasarkan pada masalah atau kebutuhan yang dikarang pihak tertentu untuk memenuhi kepentingannya. Mengingat kebijakan bagian dari administrasi publik, maka yang menjadi perhatian adalah masalah, kebutuhan, dan aspirasi publik. Oleh karena itu agar kebijakan yang diambil menjadi sebuah solusi terhadap berbagai masalah yang dihadapi masyarakat, maka perlu dirumuskan suatu strategi dalam penyusunan kebijakan tersebut.

Siagian (2004:15) mengemukakan bahwa strategi adalah suatu istilah yang semula bersumber dari kalangan militer yang memiliki arti "kiat yang digunakan untuk memenangkan peperangan. " Sebuah kemenangan adalah tujuan yang ingin dicapai dalam suatu peperangan, maka dapat diartikan bahwa strategi pada hakekatnya adalah suatu cara, kiat, atau siasat untuk mencapai tujuan. Pendapat Siagian sejalan dengan Echols (1996 : 560) yang menyatakan bahwa strategi (strategy) adalah "ilmu siasat dalam perang"sedangkan strategis (strategic) dimaknai sebagai suatu upaya yang dijalankan menurut siasat atau rencana. Dari pendapat ahli di atas dapat dibuat sebuah definisi bahwa yang dimaksud dengan kebijakan strategis adalah suatu proses pembuatan keputusan untuk penentuan tujuan dan cara atau alternatif terbaik dalam mencapai tujuan tersebut yang didasarkan pada siasat/kiat atau strategi tertentu.

Suatu Strategi kebijakan perlu dijalankan mengingat banyak faktor yang harus diperhatikan dan berpengaruh terhadap produk akhir sebuah kebijakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penyusunan kebijakan tersebut adalah faktor eksternal berupa

pengaruh lingkungan, sosial-politik serta para stakeholder yang memiliki kepentingan terhadap produk kebijakan, dan faktor internal seperti masalah kelembagaan, sumber daya manusia. Masalah ketersediaan waktu atau masalah sumber biaya/anggaran.

Dalam kaitan dengan kebijakan strategi pada sektor pariwisata terdapat kebijakan-kebijakan tentang pengembangan pariwisata yang sesuai dengan prinsip pengembangan pariwisata adalah undang-undang RI Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan (pasal 6; pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan asas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 yang mewujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya dan alam serta kebutuhan manusia untuk berwisata) pasal 8, yakni; **Pertama**, pembangunan kepariwisataan dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional, dan rencana induk pembangunan kepariwisataan provinsi, dan rencana pembangunan kabupaten/kota. **Kedua**, pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan jangka panjang nasional. Pasal 1 : pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan untuk mendukung pembangunan kepariwisataan). Serta pasal 12:1) aspek-aspek penetapan kawasan strategis pariwisata. Pengembangan industri pariwisata sendiri mempunyai pengaruh yang cukup kuat bagi perkembangan wilayah sekitar obyek wisata, karna dapat bertindak sebagai industri sektor utama, yaitu unggulan yang mampu meningkatkan perekonomian daerah terutama bagi daerah yang merupakan daerah otonomi baru. Agar tidak menjadi daerah yang tertinggal, harusnya dapat menjadi suatu

batu loncatan untuk mengembangkan daerah tersebut dan meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor pariwisata yang ada.

Kabupaten Malaka adalah salah satu kabupaten di Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Ibu kotanya berada di Betun. Malaka merupakan hasil pemekaran dari kabupaten Belu yang disahkan dalam sidang paripurna DPR RI pada 14 Desember 2012 di gedung DPR RI tentang rancangan UU Daerah Otonomi Baru (DOB). Kabupaten ini berbatasan langsung dengan Negara Timor Leste. Dasar hukum UU No. 3 tahun 2013, Malaka terdiri dari pesisir dataran rendah, lembah dan sebagian besar merupakan perbukitan di bagian utara. Kabupaten Malaka dibagi menjadi 12 kecamatan diantaranya yakni,

Botin Leobele, Io Kufeu, Kobalima, Kobalima Timur, Laen Manen, Malaka Barat, Malaka Tengah, Malaka Timur, Rinhat, Sasita Mean, Weliman, Wewiku. Pemerintah kabupaten Malaka menetapkan 8 pantai sebagai destinasi wisata untuk dikelola oleh pemerintah kabupaten sebagai destinasi wisata unggulan yaitu 'Motadikin, Wemasa, Lodik, Raihenek, Taberek, pantai Komu, Kletek, dan pantai Abunenok. Selain itu juga terdapat destinasi wisata alam lainnya seperti Danau Mentasi, dan Nanebot, gua Maria, gua kelelawar, mata air Weliman, mata air Wematan Maromak Oan Laran, Bendungan Benenai, serta Penangkaran Rusa, adapun wisata budaya diantaranya *hamis batar no hatama mamaik* yang merupakan upacara adat sebagai tanda syukur dimulainya musim panen jagung. Selain itu rumah serta perkampungan adat khas juga masih bisa di jumpai, diantaranya perkampungan adat Tuaninu Taisuni, Wekumu dan rumah adat Loro Dirma di kecamatan Malaka Timur, serta perkampungan adat Kamanasa. Selain itu juga

terdapat cagar alam Maubesi yang merupakan cagar alam hutan bakau yang berada dipesisir kecamatan Kobalima hingga kecamatan Malaka Tengah.

Sebagai daerah otonomi baru, tentunya pemerintah kabupaten Malaka harus berbenah dan melakukan pembangunan disegala sektor. terutama disektor pariwisata, karena Malaka merupakan daerah dengan potensi pariwisata yang cukup besar tentu harus di dukung dengan infrastruktur yang memadai seperti infrastruktur jalan untuk kemudahan akses bagi wisatawan untuk menjangkau tempat tujuan wisatanya. Sebelum menjadi daerah otonomi baru, pariwisata pantai Motadikin dikelola Oleh Pemerintah Kabupaten Belu Dinas Pariwisata setelah menjadi daerah otonomi baru pemerintah daerah kabupaten Malaka dituntut untuk mandiri dalam melakukan pembangunan dan pengembangan di segala sektor khususnya sektor pariwisata. Sejauh ini hal tersebut telah dibuktikan oleh pemerintah kabupaten Malaka, sedikit demi sedikit pemerintah daerah mulai berbenah, salah satunya dengan melakukan perbaikan infrastruktur jalan sedikit membaik bahkan daerah-daerah yang terpencilpun sedikit demi sedikit telah dilakukan perbaikan infrastruktur jalan untuk mempermudah akses masyarakat.

Pantai yang satu ini memiliki aura wisata yang sangat luar biasa, keindahannya sangat menakjubkan, namanya pantai Motadikin Pantai ini di sebut Pantai Motadikin, karna dialiri oleh dua aliran sungai, dari sebelah utara terdapat aliran sungai dari Kada yang biasa disebut oleh masyarakat setempat dengan sebutan Maubesi Hasan dan dari sebelah selatan dialiri oleh sungai Benenai Yang hilirnya biasa disebut oleh masyarakat setempat dengan sebutan Hasan Motafoun.

Pantai Motadikin terletak tidak jauh dari pusat ibu kota kabupaten Malaka, tepatnya di wilayah Dusun Manekin Desa Fahluka Kecamatan Malaka tengah Kabupaten Malaka. Pantai ini gemar dikunjungi warga lokal maupun nasional. Berkunjung ke Pantai Motadikin bisa menggunakan kendaraan roda dua maupun roda empat menuju lokasi. Pantai ini sangat bagus dan aman untuk dikunjungi oleh wisatawan. Lama waktu yang di tempuh sekitar 20-25 menit dari ibu kota kabupaten Malaka baik itu kendaraan beroda dua maupun beroda empat. Di lokasi wisata tersebut sudah dilengkapi dengan sarana dan prasarana.

FASILITAS PANTAI MOTADIKIN

TABEL 1.1

NO	JENIS	JUMLAH
1	LOPO	40
2	RUMAH PANGGUNG	10
3	TOILET	8
4	SUMUR	1
5	VIBER	1
6	RUANG SERBAGUNA	1

.pantai ini dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten Malaka, sejak pemekaran wilayah Malaka. Biaya Karcis Masuk Pada Tiap Destinasi Wisata Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2016 retribusi masuk pantai wisata Motadikin adalah sebagai berikut :

- KarcisMasuk (*Entrance Fee*) :Rp. 2.000,- untuk orang dewasa berlaku 1 (satu) kali masuk.

- KarcisMasuk (*Entrance Fee*) :Rp. 2.500,- untuk kendaraan roda 2(Dua) 1 (satu) kali masuk.
- KarcisMasuk (*Entrance Fee*) :Rp. 5.000,- untuk kendaraan roda 4 (Empat) 1 (satu) kali masuk

Tabel 1.2

Jumlah pengunjung obyek wisata pantai Motadikin

TAHUN	JUMLAH PENGUNJUNG (Org)	
	Wisnus	Wisman
2016	56.106	6
2017	67.000	15
2018	62.000	8

Sumber,Dinas pariwisata

Dalam upaya pengelolaan pariwisata terdapat hal- hal yang harus di perhatikan seperti kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dari segi infrastruktur atau fasilitas yang ada disekitar obyek wisata.apabila fasilitas di obyek wisata memadai maka hal tersebut menjadi kekuatan dan peluang tersendiri untuk menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara, jika fasilitas-fasilitas tersebut kurang memadai tentu akan menjadi suatu kelemahan dan ancaman bagi obyek wisata dapat menurunkan angka kunjungan wisatawan.

Pengembangan pantai Motadikin membuka lapangan kerja bagi masyarakat setempat. Banyak masyarakat yang kemudian dapat terlibat langsung maupun tidak langsung dalam aktivitas pariwisata terutama sebagai penyedia jasa pariwisata. Hal ini menjadi mata pencaharian tersendiri bagi masyarakat sekitar pantai, dengan pengembangan pantai Motadikin turut memajukan perekonomian masyarakat. Masyarakat terlibat dalam penyedia jasa wisatawan, penyedia jasa penyelamat pantai, penyedia jasa kuliner, selain itu masyarakat juga diberdayakan dalam mengelola hasil laut seperti ikan untuk diolah menjadi berbagai olahan makanan seperti ikan asin, abon ikan dan lain-lain yang juga menjadi oleh-oleh dari pantai Motadikin.

Tabel 1.3

Pendapatan daerah yang diperoleh dari tiket masuk obyek wisata pantai Motadikin

Tahun	Perolehan pendapatan dari tiket masuk
2016	Rp 20.000.000,00
2017	Rp 21.000.000,00
2018	Rp 20.536.000,00
2019	Rp 23 .000.000,00

Sumber, Dinas pariwisata.

Dampak pembangunan dan penataan obyek wisata baik itu wisata alam maupun buatan sangatlah berdampak pada kondisi sosial ekonomi masyarakat Malaka. Dengan adanya pembangunan dan penataan destinasi wisata yang ada maka jumlah wisatawan

meningkat sehingga peredaran uang (*money follow*) di Malaka secara otomatis meningkat. meningkatnya peredaran uang tersebut karena para wisatawan berbelanja produk-produk lokal masyarakat baik itu makanan, hasil kerajinan (tenun ikat, dan lain-lain) ketika melakukan kunjungan didestinasikan wisata yang tersebar diseluruh wilayah Malaka. Dengan demikian, pendapatan ekonomi masyarakat meningkat sebagai dampak dari pembangunan dan pengembangan pantai motadiki.

Tetapi setelah penulis melakukan observasi pada lokasi wisata, ada beberapa permasalahan yang terjadi di obyek wisata pantai Motadikin, yaitu

1. Pengelolaan sampah yang masih tidak memadai yang dilakukan pemerintah setempat, terutama saat musim libur, dengan jumlah wisatawan yang meningkat pada musim libur membuat sampah banyak tercecer disekitar pantai. selain itu karena kurangnya kesadaran dari para wisatawan mengenai pentingnya kebersihan pantai, juga karena kesediaan tempat sampah yang masih minim..
2. Beberapa ruas jalan yang sempit, dan ruas jalan sekitar satu kilometer belum diperbaiki atau masih dalam kondisi yang kurang baik.
3. Banyak perahu-perahu nelayan yang terparkir sembarang disekitar bibir pantai yang mengganggu aktivitas berenang wisatawan sehingga menghalang pemandangan pantai tersebut

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“STRATEGI PENGEMBANGAN PARIWISATA DI PANTAI MOTADIKIN, KABUPATEN MALAKA (STUDI KASUS PADA DINAS PARIWISATA KABUPATEN MALAKA)”**.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah yang penulis ambil adalah; bagaimana strategi pengembangan pantai Motadikin oleh Dinas Pariwisata Kabupten Malaka?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Bertolak dari rumusan masalah diatas yang merupakan tujuan penelitian ini adalah; Untuk mengetahui strategi pengembangan Pantai Motadikin oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Malaka.

1.4. MAMFAAT PENELITIAN

- a. Dapat memberikan masukan kepada Dinas setempat untuk mengetahui pengembangan pantai motadikin .
- b. Sebagai tambahan informasi penulis yang berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang pengembangan strategi.
- c. Sebagai bahan informasi bagi peneliti lain yang ingin melakukan penelitian lanjutan dalam bidang yang sama lebih mendalam.